



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

UNIT KERJA : UNIT INDUK DISTRIBUSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA, DAN
SULAWESI BARAT (UID SULSELBARAB)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMIRUDDIN
2. Jabatan : ASSISTANT MANAGER JARINGAN DAN KONSTRUKSI
3. NHK : 732835

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 890.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 390 m2/200 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000
2. Tanah Seluas 330 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 331.500.000

1. MOTOR, KAWASAKI NINJA 150R Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOBIL, HR V 1.5 L SE CVT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.969.250

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 174.740.336

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.419.209.586

III. HUTANG Rp. 75.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.344.209.586

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.